



PENGARUH PELAKSANAAN KEBIJAKAN ANGGARAN TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN KUALITAS PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KABUPATEN GARUT

Yusup Hermawan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Garut

hermawanyusup69@yahoo.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Anggaran terhadap Pengelolaan APBD Untuk Mewujudkan Kualitas Pertanggungjawaban Keuangan Kabupaten Garut. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis statistik dengan model analisis jalur (*path analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Kebijakan Anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap Pengelolaan APBD Untuk Mewujudkan Kualitas Pertanggungjawaban Keuangan Kabupaten Garut.

Kata kunci: Pelaksanaan Kebijakan Anggaran, Pengelolaan APBD, Kualitas Pertanggungjawaban Keuangan.

1. Pendahuluan

Pertanggungjawaban keuangan Kabupaten Garut hingga tahun 2009 belum sepenuhnya dapat memuaskan berbagai pihak. Ketidakpuasan para pihak, yakni masyarakat, DPRD serta para *stakeholder* lain terkait dengan prinsip akuntansi pada anggaran, data yang secara periodik belum dipublikasikan, serta aksesibilitas laporan yang rendah.

Salah satu faktor yang menyebabkan pertanggungjawaban keuangan pemerintah Kabupaten Garut belum memuaskan para pihak diduga antara lain belum optimalnya pelaksanaan kebijakan anggaran yang dicirikan dengan belum maksimalnya sosialisasi kebijakan anggaran, tingkat kompetensi sumberdaya pegawai belum memenuhi harapan, keterbatasan pendanaan dan ketersediaan sarana penunjang, serta masih rendahnya tingkat koordinasi antar SKPD.

Selain faktor belum optimalnya pelaksanaan kebijakan anggaran, masalah belum berkualitasnya pertanggungjawaban keuangan Kabupaten Garut juga dipengaruhi oleh faktor pengelolaan APBD yang belum efektif. Hal ini terlihat dari capaian realisasi APBD Tahun 2009 yakni sebesar 98,71%, belanja pegawai yang mencapai hampir 50 % sedangkan belanja modal hanya sebesar 25 % dari keseluruhan pembiayaan daerah, keterlambatan transfer dana bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke kas daerah Kabupaten Garut dan SKPD pada akhir tahun anggaran selalu terlambat permintaan pembayaran pada pihak ketiga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Anggaran terhadap Pengelolaan APBD Untuk Mewujudkan Kualitas Pertanggungjawaban Keuangan Kabupaten Garut.

2. Kerangka Teori

2.1 Pelaksanaan Kebijakan Anggaran

Pengertian pelaksanaan kebijakan menurut Wahab (dalam Iskandar, 2009:205) sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, yang biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah eksekutif atau dekrit presiden. Edwards III (dalam Iskandar, 2009: 221) menyatakan bahwa “suatu keberhasilan dan kegagalan implementasi atau pelaksanaan suatu kebijakan dapat dievaluasi dari empat dimensi kritis, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi.

2.2 Pengelolaan APBD

Suparmoko (2009:61) mendefinisikan pengelolaan anggaran merupakan kemampuan yang berhubungan dengan usaha untuk mencapai tujuan anggaran dengan jalan menggunakan manusia dan berbagai sumber yang tersedia. Untuk mencapai standar kualitas yang ditetapkan maka anggaran harus dikelola dengan sebaik-baiknya yaitu dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran yang meliputi perencanaan anggaran, ratifikasi anggaran, pelaksanaan anggaran, serta pelaporan dan evaluasi (Spicer dan Bingham dalam Mardiasmo, 2009:108-109).

2.3 Kualitas Pertanggungjawaban Keuangan

Kualitas pertanggungjawaban keuangan pemerintah ditentukan oleh kepuasan masyarakat terhadap laporan keuangan yang disampaikan. Instrumen utama dari kualitas pertanggungjawaban keuangan adalah anggaran pemerintah, data yang secara periodik dipublikasikan, laporan tahunan dan hasil investigasi dan laporan umum lainnya yang disiapkan oleh agen yang independen. Anggaran tahunan secara khusus mempunyai otoritas legal untuk pengeluaran dana publik, sehingga proses penganggaran secara keseluruhan menjadi relevan untuk manajemen fiskal dan untuk melaksanakan akuntabilitas keuangan dan pengendalian pada berbagai tingkat operasi (Shende dan Bennet, dalam Mardiasmo, 2009: 32)

3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan desain kuantitatif. Analisis data menggunakan teknik statistik dengan model analisis jalur (*path analysis*). Populasi penelitian adalah seluruh pegawai pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Garut, seluruhnya berjumlah 203 orang. Teknik pengambilan sampel dengan teknik *cluster randomsampling*. Jumlah sampel adalah sebanyak 68 orang, dan pengambilan data menggunakan angket dan wawancara.

4. Pembahasan

Rata-rata jawaban responden pada variabel Pelaksanaan Kebijakan Anggaran adalah 72,16 persen dengan kriteria baik. Indikator dengan nilai persentase tertinggi ada pada item “Terdapat tugas-tugas dan prosedur-prosedur yang rutin dalam rangka pelaksanaan kebijakan anggaran”, sebesar 80 persen dengan kriteria baik. Sedangkan persentase terendah terdapat pada item “Anggaran untuk menerapkan kebijakan tersedia memadai” sebesar 54,71 persen dengan kriteria Cukup Dimensi dengan rata-rata jawaban tertinggi terdapat pada dimensi komunikasi dengan persentase sebesar 76,03 persen dan dimensi dengan persentase terendah yakni dimensi sumberdaya dengan persentase sebesar 65,51persen. Masalah yang ditemukan berdasarkan hasil

penelitian pada variabel Pelaksanaan Kebijakan Anggaran adalah kurangnya anggaran, kurangnya kompetensi SDM dan kurangnya koordinasi kebijakan.

Rata-rata jawaban responden pada variabel pengelolaan APBD adalah **baik** yaitu sebesar 75,80 persen. Indikator dengan nilai persentase tertinggi ada pada item “Hasil pembahasan terhadap APBD yang diajukan menghasilkan revisi/perubahan-perubahan dan segera ditindaklanjuti dengan melakukan perubahan-perubahan anggaran”, sebesar 80,59 persen dengan kriteria baik. Sedangkan persentase terendah terdapat pada item “Setiap bulan penggunaan serta progress anggaran selalu disusun ke dalam neraca anggaran” sebesar 67,35 persen dengan kriteria Cukup. Dimensi dengan rata-rata jawaban tertinggi terdapat pada dimensi pelaksanaan dengan persentase sebesar 78,01 persen dan dimensi dengan persentase terendah yakni dimensi pelaporan dan evaluasi dengan persentase sebesar 72,18 persen. Masalah yang ditemukan berdasarkan hasil penelitian pada variabel Pengelolaan APBD adalah kemampuan menginventarisasi biaya-biaya pembangunan masih kurang dan pembuatan neraca bulanan belum rutin.

Rata-rata jawaban responden pada variabel kualitas pertanggungjawaban keuangan adalah **baik** yaitu sebesar 73,25 persen. Indikator dengan nilai persentase tertinggi ada pada item “Pelaksanaan pemeriksaan meliputi penilaian prosedur, mekanisme dan bukti-bukti (SPJ) dan lain-lain yang terkait”, sebesar 83,82 persen dengan kriteria baik. Sedangkan persentase terendah terdapat pada item “Hasil penilaian badan independen diumumkan secara terbuka” sebesar 62,65 persen dengan kriteria Cukup. Dimensi dengan rata-rata jawaban tertinggi terdapat pada dimensi otoritas legal penggunaan dana publik dengan persentase sebesar 77,13 persen dan dimensi dengan persentase terendah yakni dimensi penyajian laporan tahunan dengan persentase sebesar 67,73 persen. Masalah yang ditemukan berdasarkan hasil penelitian pada variabel Kualitas Pertanggungjawaban Keuangan adalah masih kurangnya keterbukaan laporan pertanggungjawaban keuangan, perencanaan keuangan, hasil penilaian badan independen dan aksesibilitas laporan keuangan daerah dan publikasi data belum maksimal

5. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Kebijakan Anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap Pengelolaan APBD untuk mewujudkan Kualitas Pertanggungjawaban Keuangan sebesar 51,95 persen, dengan korelasi sebesar 0,72 artinya ada pada tingkat hubungan kuat.

Daftar Pustaka

- Dunn, William, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjahmada University Press.
- Handoko, T. Hani. 2001. *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- _____. 2007. *Manajemen*: Edisi V. Yogyakarta: BPFE.
- Hasibuan, Malayu, S.P. 2007. *Manajemen Sumberdaya Manusia*: edisi revisi.
- Iskandar, Jusman. 2009^a. *Kapita Selekta Administrasi Negara*. Bandung: Puspaga.
- _____. 2009^b. *Manajemen Publik*. Bandung: Puspaga.
- _____. 2009^c. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Bandung: Puspaga.
- _____. 2009^d. *Teori Administrasi*. Bandung: Puspaga.
- _____. 2009. *Beberapa Indeks dan Skala Pengukuran Variabel-Variabel Sosial dan Psikologi*. Bandung: Puspaga.
- LAN dan BPKP. 2001. *Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah*, Modul 3 dari 5 Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Jakarta.

- _____, 2002, *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta.
- Lubis. 2001. *Manajemen, Pengertian dan Masalah*. Bandung: PT. Bina Karya.
- Mangkunegara, Anwar Prabu . 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo, 2001. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nawawi, Hadari. 2002. *Manajemen Strategik*. Yogyakarta: Gadjahmada University Press.
- Poerwadarminta, W.J.S, 2002. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Program Pascasarjana Universitas Garut, 2009, *Pedoman Penulisan Tesis*, Program Pascasarjana Uniga. Garut
- Rusli, Budiman. 2004, *Isu-Isu krusial Administrasi Publik Kontemporer*. Bandung: Lepsindo.
- _____, (2003), *Kebijakan Publik: Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*, Bandung: Hakim Publishing.
- _____, (2003), *Administrasi Publik Kontemporer*. Bandung: Hakim Publishing.
- Sedarmayanti. 2002. *Sumber Daya Manusia dan Produktifitas Kerja*. Bandung: Mahdar Maju.
- Siagian, Sondang P. 2001. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Singarimbun dan Effendi. 2010. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: LP3ES.
- Soeharto 2000. *Manajemen Proyek Dari Konseptual Sampai Operasional*. Jakarta: Erlangga.
- Steers. Rivhard. M. 2000. *Efektivitas Organisasi*: edisi VI. Jakarta: Erlangga.
- Sudjana. 2000. *Teknik Analisis Regresi dan Korelasi*. Bandung: Binacipta.
- Sugiyono. 2002. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta.
- _____. 2002. *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono. Bambang. 2001. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suparmoko, M. 2002. *Keuangan Negara: Dalam Teori dan Praktek*: edisi keenam. Yogyakarta: BPFE.
- Supriatna, Tjahya. 2000. *Manajemen dan Birokrasi Pemerintahan*. Program Pascasarjana Unjani dan STPDN Bandung.
- Thoah, Miftah. 2002. *Kebijakan dan Pelayanan Publik*. Jakarta: PT. Grafindo Perkasa.
- _____. 2000. *Dimensi – dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Wahab, A. Solichin. 2002,. *Analisis Kebijaksanaan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Dokumen dan Peraturan-Peraturan

- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang *Keuangan Negara*.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang *Perbendaharaan Negara*.
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.
- Undang-undang No 32 tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000 Tentang *Dana Perimbangan*.
- Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Tentang *Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 Tentang *Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah*.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 Tentang *Pedoman Pengurusan, Pertanggung-jawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha*

Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*

Peraturan Bupati Garut Nomor 413 Tahun 2008 tentang *Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Garut.*

Sekretariat Daerah Kabupaten Garut : *“Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2009”*

Laporan Realisasi APBD Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2009, Kantor DPPKA Kabupaten Garut.